



**PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DESA DI DESA TAMANGEDE KECAMATAN
GEMUH KABUPATEN KENDAL**

SKRIPSI

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Pada Universitas Negeri Semarang**

Oleh

**Nelli Fitri Khumaidi
7101416149**

**PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitian ujian skripsi pada:

Hari : Senin

Tanggal : 27 Juli 2020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi



Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si
NIP 198201302009121005

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fahrur Rozi", written over a horizontal line.

Fahrur Rozi, S.Pd., M.Pd., Ph.D
NIP 197610222008121002

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 25 Agustus 2020

Penguji I

Dr. H. Muhsin, M.Si
NIP 195411011980031002

Penguji II

Tussyah, S.Pd., M.Pd
NIP 198308012015042003

Penguji III

Fahrur Rozi, S.Pd., M.Pd., Ph.D
NIP 197610222008121002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Drs. Heri Yanto, M.B.A., Ph.D
NIP 196307181987021001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nelli Fitri Khumaidi
NIM : 7101416149
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 5 Desember 1998
Alamat : Jalan Karanganyar No. 27 RT 07 RW 02
Desa Tamangede, Kecamatan Gemuh
Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 22 Juli 2020



Nelli Fitri Khumaidi
NIM 7101416149

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Kebijakan dan kebajikan adalah
perisai terbaik.

(Aspinal)

Persembahan

1. Kedua orang tua saya, Bapak Jumron dan Ibu Fatimah yang senantiasa mendoakan setulus hati.
2. Almamater Universitas Negeri Semarang

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan taufiq, hidayah, dan inayahnya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal”.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapat dukungan, dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., selaku Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan pada peneliti untuk menyelesaikan studi di Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran,
2. Drs. Heri Yanto, MBA, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kemudahan administrasi perizinan selama melakukan penelitian,
3. Ahmad Nurkhin, S.Pd., M.Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian,
4. Fahrur Rozi, S.Pd., M.Pd., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kasih sayang dan kesabaran serta tanggungjawab. Terimakasih atas nasihat, ilmu dan motivasi yang telah diberikan,

5. Tussyanah, S.Pd., M.Pd., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan dalam kesempurnaan skripsi ini,
6. Dr. H. Muhsin, M.Si., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan arahan dalam kesempurnaan skripsi ini,
7. Hj. Nur Sikoh S.Ag., M.Pd., selaku Kepala Desa Tamangede yang telah memberikan ijin dilaksanakannya penelitian di Desa Tamangede,
8. Perangkat Desa Tamangede yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini,
9. Keluarga tercinta yang telah memberikan do'a, dukungan moril maupun materiil dalam penyelesaian skripsi ini,
10. Teman-teman yang telah memberikan dukungan dan selalu kebersamai masa kuliah hingga selesai.
11. Semua pihak yang telah memberikan motivasi yang telah memberikan motivasi, bantuan, dukungan, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu.

Semarang, 27 Juli 2020



Peneliti

SARI

Khumaidi, Nelli Fitri. 2020. *“Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal”*. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Fahrur Rozi, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 186 Halaman.

Kata Kunci: Administrasi, Pemerintahan Desa, Administrasi Desa

Administrasi pemerintahan desa sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana berpengaruh terhadap kelancaran jalannya pemerintahan. Keunikan Desa Tamangede adalah satu-satunya desa di Kecamatan Gemuh yang dipimpin oleh Kepala Desa perempuan dalam dua periode dengan gelar Magister, serta merupakan desa yang memiliki pengelolaan sampah terbaik di Kabupaten Kendal. Hasil penelitian awal menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan desa masih kurang baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan tugas administrasi oleh perangkat desa serta pelaksanaan administrasi pemerintahan desa ditinjau dari beberapa aspek.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Dalam penelitian ini terdapat lima informan yaitu penanggungjawab Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Umum dan Perencanaan, Kaur Keuangan, dan Kasie Pemerintahan. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas administrasi oleh perangkat Desa Tamangede belum sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing perangkat desa. Pelaksanaan administrasi pemerintahan desa Tamangede ditinjau dari pencatatan data secara manual belum berjalan dengan baik pada pengisian buku register desa, sedangkan pada pencatatan data berbasis sistem informasi sudah berjalan dengan baik. Pembinaan mengenai administrasi desa dilaksanakan setahun sekali oleh pihak kecamatan dan pihak kabupaten secara bergantian, sedangkan pengawasan pelaksanaan administrasi dilakukan oleh pihak kecamatan dan Badan Permusyawaratan Desa. Pelaporan terkait administrasi desa diteruskan kepada pihak kabupaten melalui pihak kecamatan.

Simpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan tugas administrasi oleh perangkat desa belum sesuai dengan Tupoksi, pencatatan data secara manual masih kurang baik dan tertib pencatatan berbasis sistem informasi sudah baik, pembinaan tentang administrasi desa dilaksanakan oleh pihak kecamatan dan pihak kabupaten sedangkan pengawasan dilaksanakan oleh pihak kecamatan dan Badan Permusyawaratan Desa, serta pelaporan terkait administrasi dilaporkan pada kabupaten. Saran penelitian ini adalah Kepala Desa Tamangede sebaiknya berperan aktif mendampingi perangkat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi, pengadaan evaluasi mengenai pelaksanaan administrasi oleh perangkat desa, memberikan pelatihan bagi perangkat desa yang dilaksanakan secara rutin, serta perangkat desa seharusnya memiliki kesadaran untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan diri.

ABSTRACT

Khumaidi, Nelli Fitri. 2020. *“The Implementation of Village Government Administration in Tamangede Village Gemuh Sub-District Kendal Regency”*. Final Project. Economics Education Department. Economics Faculty. Universitas Negeri Semarang. Advisor: Fahrur Rozi, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 186 pages.

Keywords: Administration, Village Government, Village Administration

The Administration of Village Government is very important for village government activity, wherein the administration has an influence to drive for the smoothness of the village government. The uniqueness of Tamangede Village is that it is the only village in Gemuh Sub-district led by a female Village Head who has a Master's degree in two periods, and the village that has the best waste management in Kendal Regency. The result of preliminary research showed that the implementation of village administration in Tamangede is not good enough. The purpose of this study was to analyze the implementation of administrative duties by village officials and the implementation of Tamangede village administration in terms of several aspects.

The research used a qualitative approach. The techniques of collecting data were interviews, observation, and documentation. There are five informants in this study were the village head, the village secretary, head of general and planning affairs, head of financial affairs, and head of the government section. The data analysis used data reduction, data presentation, and concluding.

The results show that the implementation of administrative duties by village officials is not following the main tasks and functions of each village government. The implementation of village administration in Tamangede in terms of data recording manually is not good enough at filling the village register book, while data recording based on information systems is good enough. Guidance of village administration is held once a year by sub-district and district consecutively, while supervision of administration is performed by sub-district and Village Consultative Board. Reports related to village administration are forwarded to the district through sub-district.

It can be concluded that the implementation of administrative duties is not following the main tasks and functions, data recording manually is not good enough and data recording based on information systems is good enough, the guidance of village administration is held by sub-district and district while supervision of administration performed by sub-district and Village Consultative Board, and reports related to village administration are reported to the district. Suggestions that can be given are the head of Tamangede village should actively participate in accompanying village officials in carrying out their administrative duties, evaluate the implementation of administration by village officials, providing training for village officials which is carried out routinely, and village officials should have the self-awareness to improve their skills and abilities.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
SARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian	1
1.2. Cakupan Masalah Penelitian	6
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Kegunaan Penelitian	8
1.6. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1. Pengertian Administrasi	10
2.2. Pengertian Desa	10
2.3. Pemerintah dan Pemerintahan Desa.....	11
2.3.1. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan Desa	11
2.3.2. Unsur Pemerintah Desa.....	12
2.3.3. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa.....	13
2.4. Administrasi Pemerintahan Desa.....	17
2.4.1. Pengertian Administrasi Pemerintahan Desa.....	17
2.4.2. Ruang Lingkup Administrasi Pemerintahan Desa.....	17

2.5. Sistem Informasi Administrasi Desa.....	19
2.5.1. Pengertian Sistem Informasi	19
2.5.3. Penelitian Terdahulu.....	23
2.6. Kerangka Berpikir.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Pendekatan dan Desain Penelitian	30
3.2. Fokus dan Lokus Penelitian.....	31
3.3. Sumber Data Penelitian.....	31
3.4. Teknik Pengumpulan Data	32
3.5. Teknik Keabsahan Data	34
3.6. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1. Deskripsi Latar Penelitian	38
4.1.1. Sejarah Desa Tamangede	38
4.1.2. Kondisi Geografis Desa Tamangede	39
4.1.3. Visi dan Misi Desa Tamangede	39
4.1.4. Pemerintah Desa Tamangede.....	40
4.2. Hasil Penelitian.....	40
4.2.1. Pelaksanaan Tugas Administrasi oleh Perangkat Desa Tamangede ...	40
4.2.2. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Tamangede.....	43
4.2.3. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Tamangede.....	55
4.2.4. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa	57
4.3. Pembahasan	61
4.3.1. Pelaksanaan Tugas Administrasi oleh Perangkat Desa Tamangede ...	61
4.3.2. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Tamangede.....	64
4.3.3. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Tamangede.....	70
4.3.4. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa	72

BAB V PENUTUP	74
5.1. Simpulan.....	74
5.2. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa	14
Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu	24
Tabel 4.1. Aparat Pemerintah Desa	40
Tabel 4.2. Perbandingan Pelaksanaan Tugas Administrasi dengan Tupoksi	42
Tabel 4.3. Ketersediaan Buku Register Desa	43
Tabel 4.4. Kesesuaian Isi Buku Register Desa dengan Pedoman	45
Tabel 4.5. Pengisian pada Buku Register Desa	47
Tabel 4.6. Kesesuaian Sistem Informasi dengan Kebutuhan	49
Tabel 4.7. Kelengkapan Sub Sistem pada Sistem Informasi	50
Tabel 4.8. Input Data pada Sistem Informasi	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir	29
Gambar 3.1. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data	36
Gambar 3.2. Komponen dalam Analisis Data (<i>Interactive Model</i>)	37
Gambar 4.1. Model Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian	82
Lampiran 2. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	83
Lampiran 3. Daftar Narasumber	84
Lampiran 4. Pedoman Wawancara Pendahuluan	85
Lampiran 5. Pedoman Observasi Pendahuluan	86
Lampiran 6. Hasil Wawancara Pendahuluan	87
Lampiran 7. Hasil Observasi Pendahuluan	89
Lampiran 8. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	90
Lampiran 9. Instrumen Penelitian	92
Lampiran 10. Pedoman Wawancara	95
Lampiran 11. Pedoman Observasi.....	104
Lampiran 12. Pedoman Dokumentasi.....	105
Lampiran 13. Hasil Wawancara	106
Lampiran 14. Hasil Observasi	122
Lampiran 15. Analisis Data	125
Lampiran 16. Dokumentasi	146

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan, yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi. Setiap daerah/wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten/kota dan dalam setiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Meskipun desa dan kelurahan sering disebut sama karena sama-sama satuan pemerintahan terendah, namun keduanya memiliki status berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi untuk mengatur dan mengurus wilayahnya sehingga merupakan badan hukum. Sementara itu, kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota sehingga hanya merupakan tempat beroperasinya pelayanan pemerintah dari pemerintah kabupaten/kota setempat (Nurcholis, 2011:1-3).

Berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Desa merupakan sekumpulan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan dari urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat tersebut yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh perangkat desa. Dimana perangkat desa terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Pelaksanaan pemerintahan desa di Indonesia

menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan desa secara nasional sudah berjalan dan terdapat perubahan yang cukup signifikan, tetapi masih ada beberapa tantangan dalam implementasinya (Aminudin, 2019:16).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tentu saja terdapat kegiatan administrasi. Administrasi dalam arti luas merupakan proses kerja sama dua orang atau lebih untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan pengertian administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, menetik, dan lain-lain atau dapat dikatakan kegiatan yang berhubungan dengan ketatausahaan. Administrasi yang dilaksanakan di desa disebut administrasi pemerintahan desa. Berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun 2016, administrasi pemerintahan desa dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa administrasi pemerintahan desa merupakan arti sempit dari pengertian administrasi. Ruang lingkup administrasi pemerintahan desa terdiri atas lima administrasi, yaitu administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan, administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya.

Pelaksanaan administrasi di desa dapat dikembangkan sesuai dengan budaya wilayah tersebut. Hasbullah, dkk (2020) pernah melakukan penelitian di Desa Nagari Kapau dengan judul "*The implementation of Customary Values on The Administration of Governance: A Study on The Village Governance Based on Local Wisdom at Nagari Kapau, Agam Regency of West Sumatera, Indonesia*", dimana nilai-nilai tradisional di Nagari Kapau adalah modal sosial yang digunakan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa Nagari sebagai pemerintahan adat.

Selain itu, penelitian oleh Nas, dkk (2019) dengan judul “*Indigenous Village Governance: Lessons From Indonesia*”, menunjukkan bahwa Desa Tanah Toa juga melaksanakan pemerintahannya dengan nilai lokalisasi.

Administrasi pemerintahan desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dimana administrasi berpengaruh terhadap kelancaran jalannya pemerintahan desa. Oleh karena itu, pemerintah desa sebagai pelaksana perlu menjalankan tertib administrasi. Nurcholis (2011:135) menyatakan bahwa :

“Pemerintahan Desa akan berjalan dengan lancar manakala didukung oleh sistem administrasi yang benar, rapi dan tertib. Sistem administrasi yang benar, rapi, dan tertib akan memberikan data dan informasi yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana, kontrol kegiatan, evaluasi, dan komunikasi dan informasi baik ke dalam maupun keluar organisasi.”

Pentingnya administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa belum diimbangi dengan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian oleh Marnis, dkk (2013) dengan judul “*Development of Public Administration Program Development System in Rural Services in Order to Increase the Capacity of Governance in Village East Java*”, menunjukkan hasil bahwa tidak optimalnya realisasi administrasi desa, terutama tercermin dari masih belum jelasnya standar kinerja yang dapat diukur untuk menentukan kualitas hasil yang dihasilkan. Berdasarkan penelitian oleh Dewi (2012) dengan judul “Analisis Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak”, pelaksanaan administrasi pemerintahan desa banjar seminai dilihat dari peraturan pemerintah No. 27 Tahun 2005 menunjukkan hasil “Kurang Baik”. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan administrasi pemerintahan desa dilihat dari pelaksanaan

tugas administrasi oleh masing-masing perangkat desa. Sedangkan penelitian oleh Arsjad (2018) dengan judul “Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo”, menunjukkan bahwa peran aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi di Desa Karyamukti Mootilango Kabupaten Gorontalo masih kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Kedua penelitian diatas juga menganalisis mengenai pencatatan data dan informasi pada buku register desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa.

Kabupaten Kendal merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Kendal terbagi menjadi 20 kecamatan, salah satunya adalah Kecamatan Gemuh. Sementara itu, Kecamatan Gemuh terbagi menjadi 16 desa dan Desa Tamangede adalah desa yang terletak di Kecamatan Gemuh bagian timur. Desa Tamangede memiliki keunikan yang membedakan desa tersebut dengan desa yang lain. Keunikan tersebut adalah Tamangede merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Gemuh yang dipimpin oleh Kepala Desa perempuan yang memiliki gelar Magister dalam dua periode. Desa Tamangede juga merupakan desa yang memiliki pengelolaan sampah terbaik di Kabupaten Kendal, dimana menjadi satu-satunya desa yang sudah melakukan pemilahan sampah dari hulu ke hilir.

Berdasarkan observasi awal yang dilaksanakan di Desa Tamangede, dijumpai bahwa pelaksanaan administrasi belum berjalan dengan baik. Sekretaris Desa selaku koordinator bidang administrasi pemerintahan desa menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dalam administrasi pemerintahan desa oleh perangkat desa belum berjalan dengan maksimal dan belum sesuai dengan tupoksi (Tugas Pokok

dan Fungsi) masing-masing. Hal tersebut disampaikan dalam wawancara pada tanggal 2 Januari 2020 bertempat di Balai Desa Tamangede berikut:

“Menurut saya, belum. Pelaksanaan tugas perangkat itu belum sesuai tupoksi. Contohnya itu Kaur keuangan kan yang mengurus administrasi keuangan, tapi berhubung beliau sudah sepuh dan kurang paham teknologi, jadi untuk akses atau input data ke SISKEUDES dialihkan menjadi tugas Kaur Perencanaan.” (Lampiran hal. 87)

Selain itu, pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa Tamangede juga belum dilaksanakan dengan baik, terutama pada pencatatan data dan informasi secara manual. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Desa berikut:

“Jujur belum mbak. Terutama dibagian pencatatannya itu, banyak buku-buku yang tidak diisi. Dokumen-dokumen juga kan dulu disimpan sekretaris lama, nah ini menyimpannya tidak rapi dan terstruktur. Saya yang masih baru ya otomatis kesulitan mbak ketika mencari dokumen atau buku-buku register.” (Lampiran hal. 88)

Lebih lanjut, Sekretaris Desa menjelaskan mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan Desa Tamangede yaitu pada sumber daya manusia yang masih rendah serta sarana dan prasarana yang kurang memadai, sebagai berikut:

“...Kalau sarpras yang menunjang administrasi, terus terang belum memenuhi. Komputer dan printer yang tersedia masih kurang. Terus masalah sumber daya manusianya juga yang kurang mumpuni, terutama dalam hal pengoperasian komputer. Jadi belum bisa optimal dalam melakukan tugasnya.” (Lampiran hal. 88)

Pencatatan data dan informasi di Desa Tamangede terdapat dua cara, yaitu dicatat secara manual dan input pada sistem informasi. Pencatatan secara manual dilakukan dengan mengisi pada buku register desa yang terdiri dari buku administrasi umum, buku administrasi keuangan, buku administrasi pembangunan, dan buku administrasi penduduk. Sedangkan sistem informasi yang digunakan

adalah SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) dan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), yaitu untuk pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi penduduk.

Mengingat pentingnya kegiatan administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, diperlukan penelitian mengenai pelaksanaan tersebut di lapangan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal”**.

1.2. Cakupan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka cakupan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pelaksanaan tugas administrasi oleh Perangkat Desa yang disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi.
- 2) Pelaksanaan administrasi pemerintahan desa yang ditinjau dari tertib pencatatan data baik secara manual maupun berbasis sistem informasi, pembinaan dan pengawasan, serta pelaporan.
- 3) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa.
- 4) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan cakupan masalah yang telah diuraikan diatas, maka pertanyaan yang ingin ditanyakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan tugas administrasi oleh Perangkat Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal?
- 2) Bagaimana pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal?
- 3) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal?
- 4) Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Menganalisis pelaksanaan tugas administrasi oleh Perangkat Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.
- 2) Menganalisis pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.
- 3) Menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal.

- 4) Menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal

1.5. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain : bagi Desa Tamangede, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran dan sumbangan bagi Aparatur Desa sehingga mampu melakukan perbaikan maupun pengembangan diri menjadi lebih baik, khususnya dalam pelaksanaan tugas administrasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk memperbaiki pelaksanaan administrasi pemerintahan desa; bagi Universitas, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian maupun referensi ilmiah bagi mahasiswa maupun dosen Universitas Negeri Semarang pada umumnya dan Fakultas Ekonomi pada khususnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan penelitian untuk penelitian lanjutan mengenai permasalahan yang sejenis; dan bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta mengembangkan ilmu pengetahuan administrasi bagi peneliti. Dengan penelitian ini peneliti dapat membandingkan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik yang ada di lapangan sehingga diperoleh pengalaman praktis.

1.6. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menganalisis pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal. Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Dewi (2012) dengan judul

“Analisis Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak”. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dibandingkan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini tidak hanya menganalisis pelaksanaan tugas administrasi oleh perangkat desa dan pencatatan data dan informasi pada buku register desa, melainkan juga menganalisis pelaksanaan administrasi yang ditinjau dari pencatatan berbasis sistem informasi, pembinaan dan pengawasan, serta pelaporan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Administrasi

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, tentu saja terdapat kegiatan administrasi. Administrasi dapat diartikan dalam dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerja sama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Sedangkan dalam arti sempit, administrasi adalah kegiatan yang meliputi mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan (Kuswantoro, 2017:5).

Sondang dalam Syafiie (2006:14) berpendapat bahwa :

“Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai administrasi diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi adalah proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, administrasi merupakan kegiatan ketatausahaan.

2.2. Pengertian Desa

Desa merupakan satuan pemerintahan terendah dibawah kecamatan dan kabupaten. Berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2015, desa merupakan sekumpulan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan wewenang dalam

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Nurcholis (2011:2), Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Oleh karena itu, desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif homogen. Masyarakat desa terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial-budaya.

Selanjutnya, Soenardjo (1984:11) dalam Nurcholis (2011:4) menjelaskan bahwa:

“Desa adalah kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan, maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.”

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai desa diatas, dapat disimpulkan bahwa desa adalah sekumpulan masyarakat yang tinggal disuatu wilayah dengan batas tertentu dan memiliki wewenang untuk mengatur wilayahnya sendiri.

2.3. Pemerintah dan Pemerintahan Desa

2.3.1. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan Desa

Pemerintah dan pemerintahan merupakan dua istilah yang sering dianggap memiliki arti yang sama. Namun, sebenarnya kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Fendri (2016:25-26) menyatakan bahwa istilah “pemerintah” dan “pemerintahan” berasal dari kata dasar “perintah” yang berarti menyuruh

melakukan sesuatu. Apabila dilihat dari segi tata bahasa, kata “pemerintahan” merupakan kata jadian yang memperoleh akhiran “an”. Jadi, dapat diartikan bahwa “pemerintah” lebih merujuk pada subjek yang melakukan tugas atau kegiatan, sedangkan “pemerintahan” sebagai cara melakukan tugas dan kegiatan tersebut.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa adalah semua aparatur desa sebagai satu kesatuan yang menjalankan tugas dan kewenangan atau kekuasaan dalam lingkup desa. Sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam lingkup desa oleh Pemerintah Desa. Sementara itu, berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2015, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa merupakan pemerintahan daerah yang semu, untuk itu lembaga desa perlu menjadi organisasi publik sesuai dengan UUD 1945, agar dapat memberikan pelayanan publik yang dapat mensejahterakan masyarakat (Nurcholis, dkk, 2019)

2.3.2. Unsur Pemerintah Desa

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan, terdiri atas beberapa unsur. Berdasarkan Permendagri No. 84 Tahun 2015, Pemerintah Desa terdiri atas Unsur Pimpinan dan Unsur Pembantu Kepala Desa atau Unsur Perangkat Desa. Unsur pimpinan adalah Kepala Desa yang merupakan pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sedangkan Unsur pembantu Kepala Desa adalah Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.

Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. Sekretariat Desa paling banyak terdiri atas tiga urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, serta sedikitnya dua urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan. Masing-masing urusan tersebut dipimpin oleh Kepala Urusan. Sedangkan, Pelaksana Kewilayahan merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Tugas Kewilayahan meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pelaksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Dusun. Selain itu, Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional. Pelaksana Teknis paling banyak terdiri atas tiga seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit dua seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

2.3.3. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa

Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa digunakan sebagai dasar pedoman pelaksanaan tugas masing-masing aparatur desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, setiap unsur pemerintah desa memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Berikut Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing pemerintah desa:

Tabel 2.1. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa

Pemerintah Desa	Tugas Pokok	Fungsi
Kepala Desa	Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat	<p>(1) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;</p> <p>(2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;</p> <p>(3) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna; dan</p> <p>(4) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.</p>
Sekretaris Desa	Membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan	<p>(1) Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;</p> <p>(2) Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;</p> <p>(3) Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber pendapatan dan pengeluaran,</p>

Pemerintah Desa	Tugas Pokok	Fungsi
		verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; (4) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan	Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
Kepala Urusan Keuangan	Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan	Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
Kepala Urusan Perencanaan	Membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan	Mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
Kepala seksi pemerintahan	Membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional	Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

Pemerintah Desa	Tugas Pokok	Fungsi
Kepala seksi kesejahteraan	Membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional	Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
Kepala seksi pelayanan	Membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional	Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
Kepala Dusun	Membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya	(1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah; (2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya; (3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; (4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sumber : Permendagri Nomor 84 Tahun 2015

2.4. Administrasi Pemerintahan Desa

2.4.1. Pengertian Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan administrasi yang dilakukan dalam lingkup desa disebut administrasi pemerintahan desa. Berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun 2016, administrasi pemerintahan desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pemerintahan desa pada buku register desa. Penyelenggaraan dan pengembangan administrasi pemerintahan desa dilakukan melalui : (1) Tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register data; dan (2) Pengembangan buku register desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Penyelenggaraan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perkembangan pemerintahan desa, dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi didalam pencatatan data dan informasi berbagai kegiatan. Dapat disimpulkan bahwa administrasi pemerintahan desa merupakan arti sempit dari administrasi yaitu pada pencatatan data dan informasi. Nurasa (2012) berpendapat bahwa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui reformasi administrasi dapat dilakukan melalui pengenalan pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.4.2. Ruang Lingkup Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan administrasi di desa, dibagi menjadi beberapa ruang lingkup untuk memudahkan dalam pelaksanaan administrasi. Berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun 2016, ruang lingkup administrasi pemerintahan desa dibagi menjadi lima, yaitu administrasi umum, administrasi penduduk, administrasi keuangan,

administrasi pembangunan, dan administrasi lainnya. kelima administrasi tersebut, memiliki fungsi dan cakupannya masing-masing.

Administrasi umum merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan pemerintahan desa dimuat dalam administrasi umum. Administrasi umum memiliki beberapa bentuk, yaitu : (1) Buku Peraturan di Desa; (2) Buku Keputusan Kepala Desa; (3) Buku Inventaris dan Kekayaan Desa; (4) Buku Aparat Pemerintah Desa; (5) Buku Tanah Kas Desa; (6) Buku Tanah di Desa; (7) Buku Agenda; (8) Buku Ekspedisi; dan (9) Buku Lembaran Desa dan Buku Berita Desa. Selanjutnya, administrasi penduduk merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kependudukan di desa baik mengenai penduduk sementara, penambahan dan pengurangan penduduk maupun perkembangan penduduk dimuat dalam administrasi penduduk. Administrasi penduduk memiliki beberapa bentuk, yaitu : (1) Buku Induk Penduduk; (2) Buku Mutasi Penduduk Desa; (3) Buku Rekapitulasi Jumlah Penduduk; (4) Buku Penduduk Sementara; dan (5) Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Keluarga.

Administrasi keuangan merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dimuat dalam administrasi keuangan. Administrasi keuangan memiliki beberapa bentuk, yaitu : (1) Buku APB Desa; (2) Buku Rencana Anggaran Biaya; (3) Buku Kas Pembantu Kegiatan; (4) Buku Kas Umum; (5) Buku Kas Pembantu; (6) dan Buku Bank Desa. Administrasi pembangunan merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam Administrasi Pembangunan. Administrasi pembangunan memiliki beberapa

bentuk, yaitu : (1) Buku Rencana Kerja Pembangunan Desa; (2) Buku Kegiatan Pembangunan; (3) Buku Inventarisasi Hasil-hasil Pembangunan; dan (4) Buku Kader Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat. Administrasi lainnya merupakan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dimuat dalam buku administrasi lainnya sesuai dengan kebutuhan. Administrasi lainnya memiliki beberapa bentuk, yaitu : (1) Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa dalam buku administrasi Badan Permusyawaratan Desa; (2) Kegiatan musyawarah Desa dalam buku musyawarah Desa; dan (3) Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat dalam buku Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat.

2.5. Sistem Informasi Administrasi Desa

2.5.1. Pengertian Sistem Informasi

Sistem informasi terdiri dari sistem dan informasi. Sistem merupakan sekumpulan komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah sehingga berguna untuk pembuatan keputusan (Winarno, 2006:5-6). Dari pengertian tersebut, Winarno (2006:6) mengemukakan bahwa sistem informasi adalah sekumpulan komponen yang saling bekerja sama, yang digunakan untuk mencatat data, mengolah data, dan menyajikan informasi untuk para pembuat keputusan agar dapat membuat keputusan dengan baik. Sementara itu, menurut O'Brien (2005:5) sistem informasi merupakan kombinasi dari orang-orang, *hardware*, *software*, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan

informasi dalam sebuah organisasi. Dari pengertian menurut ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi adalah gabungan komponen-komponen yang saling bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan informasi yang berguna untuk pembuatan keputusan serta menyebarkannya dalam organisasi.

2.5.2. Jenis Sistem Informasi Administrasi Desa

Sistem informasi yang digunakan untuk pengelolaan administrasi desa memiliki dua macam, yaitu Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK). SISKEUDES digunakan untuk mengelola keuangan desa, sementara SIK digunakan untuk pengelolaan data kependudukan.

1) Sistem Keuangan Desa

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan sistem informasi yang digunakan untuk mengelola keuangan atau dana desa. Moonti (2019), menjelaskan bahwa mekanisme pengelolaan anggaran pembangunan desa akan terlaksana jika didukung oleh SDM yang memadai dan prosedur keuangan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dan pengendalian anggaran pembangunan desa harus melalui beberapa tahapan. Sementara itu, Darmi dan Ekowati (2020), mengungkapkan bahwa keberadaan fasilitator desa berkontribusi dalam pengelolaan dana desa. Pendamping desa mampu memberdayakan masyarakat sehingga perangkat desa mampu melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersumber dari dana desa.. Berdasarkan penelitian oleh Maksam (2019), penghambat pelaksanaan pemanfaatan dana desa

adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan dana desa dan keterbatasan SDM.

Berdasarkan Buku Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), SISKEUDES dikembangkan bersama antara BPKP dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sistem ini mulai diterapkan pada tahun 2015 yang didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016. SISKEUDES ditujukan kepada aparat pemerintah desa untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/pertanggungjawaban. Prosedur penggunaan SISKEUDES oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari Pemerintah Daerah untuk penggunaan SISKEUDES kepada Kemendagri atau Perwakilan BPKP setempat. Tujuannya adalah agar penggunaan SISKEUDES dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan. Yulianti, dkk (2017) mengemukakan bahwa terdapat lima variabel yang dihasilkan yaitu pemahaman SISKEUDES, prinsip pengelolaan keuangan desa, penyaluran dana khusus, administrasi keuangan desa, pelaporan keuangan desa dan akuntabilitas, serta laporan properti desa.

Dalam penggunaan SISKEUDES, terdapat data entri yang merupakan menu untuk dioperasikan oleh pemerintah desa. Menu Data Entri dibagi dalam 4 kelompok menu yang disesuaikan dengan tahapan pengelolaan keuangan desa. Pengelompokan menu data entri dimaksud terdiri dari: (1) Perencanaan, merupakan kelompok menu yang digunakan untuk merekam Data Umum Desa, RPJMDesa

dan RKPDesa; (2) Penganggaran, merupakan kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penyusunan anggaran dengan output utama APBDesa dan Penjabaran APBDesa; (3) Penatausahaan, merupakan kelompok menu yang digunakan untuk melakukan proses penatausahaan dalam tataran pelaksanaan anggaran APBDesa yang meliputi pengajuan SPP, pencairan dan pertanggungjawaban. Output utama menu ini adalah buku-buku penatausahaan keuangan desa seperti Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Tunai, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Panjar dan Kuitansi; dan (4) Pembukuan, merupakan kelompok menu dalam rangka menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang meliputi Laporan Pelaksanaan Anggaran APBDesa dan Catatan atas Laporan Keuangan Desa (CaLK).

2) Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola data kependudukan di desa. Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sedangkan SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Liando (2012) berpendapat bahwa

implementasi kebijakan administrasi kependudukan sangat ditentukan oleh faktor komunikasi.

Penggunaan SIAK bertujuan untuk, antara lain: (1) meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; (2) menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang akurat, lengkap, dan mutakhir; dan (3) mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenal tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan data. Pengelolaan SIAK meliputi perangkat teknologi informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, sistem dan basis data, serta sarana dan prasarana yang dalam pengelolaannya disesuaikan dengan petunjuk teknis yang mengatur standar operasional prosedur. Basis Data hasil pelayanan melalui SIAK menghasilkan Data Kependudukan yang dikelola oleh Kementerian yang meliputi pengolahan data dan penyajian data. Hasil pengolahan data digunakan untuk berbagai keperluan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.5.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan penelitian. Dengan penelitian terdahulu, peneliti dapat mengetahui hasil penelitian sebelumnya yang nantinya dapat digunakan sebagai perbandingan dan gambaran yang mendukung penelitian selanjutnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain :

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Reni Mustika Dewi (2012)	Analisis Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan administrasi pemerintahan desa mendapat skor 622,2 dan dinyatakan dalam kategori “Kurang Baik”.
2.	Marnis, Samsir, Rofanita Rama dan Priyono (2013)	<i>Development of Public Administration Program Development System in Rural Services in Order to Increase the Capacity of Governance in Village East Java</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perwujudan pemerintahan desa, terutama pada objek penelitian masih belum optimal. Tidak optimalnya realisasi administrasi desa, terutama tercermin dari masih belum jelasnya standar kinerja yang dapat diukur untuk menentukan kualitas hasil yang dihasilkan.
3.	Ulima Islami (2016)	Kapasitas Aparatur Desa dalam Tertib Administrasi Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemahaman aparatur desa terhadap buku-buku administrasi desa dan tata cara pengisian buku sudah cukup; (2) Ketrampilan aparatur desa masih kurang; dan (3) Kemampuan aparatur desa belum mampu untuk menyelenggarakan tertib administrasi.
4.	Briet Maga, Ronny Gosal, Marlien Lapian (2017)	Peranan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi (Suatu Studi di Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma Kabupaten Kepulauan Talaud)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi belum berjalan dengan baik dan dapat dikatakan inprosedural.
5.	Novianty Djafri, Hedy V. A., Abdul R. (2017)	<i>The Administrative Management Capacity of Village Chief</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Kepala Desa dalam pengelolaan pemerintahan desa berada di kategori cukup baik dalam memahami pemerintahan melalui peningkatan kapasitas dalam pengelolaan pemerintahan.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
6.	I Made Sulandra dan I Nyoman Mudarya (2018)	Kemampuan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi desa kurang efektif, dan kepatuhan atau kedisiplinan kerja aparat desa dalam pelaksanaan administrasi desa masih rendah.
7.	Kadar Pamuji, Abdul Aziz Nasihuddin, Riris Ardhanariswani dan Supriyanto (2018)	<i>Role of Village Consultative Board (BPD) in Village Administration of Janggolan Villages (Study in Sub-District of Sumpiun Banyumas Region)</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD menggunakan rembung warga, selapanan, dan rapat desa untuk mengakomodasi aspirasi dan pengendalian desa. Namun, hal tersebut belum mampu menyelesaikan masalah yang ada di desa. Peran BPD di desa Janggolan lebih fokus pada menyerap aspirasi masyarakat. Kendala internal yang dihadapi adalah rendahnya kualitas anggota BPD sedangkan kendala eksternal adalah BPD belum berjalan dengan efektif.
8.	Karmawan dan Dony Yanuar (2018)	<i>Contribution Linkage and Role of Village Apparatus in Village Finance Management to Achieve Accountability of Village Revenue Expenditure Budget</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi dan peran aparatur desa sudah dalam perencanaan APBD, pelaksanaannya, administrasi dan akuntabilitas APBD juga baik.
9.	Muh. Fachri Arsjad (2018)	Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Peran aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi masih kurang maksimal; (2) Faktor-faktor

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo	yang mempengaruhi upaya peningkatan aparat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi adalah disiplin kerja, pendidikan dan pelatihan, sarana dan prasarana dan tingkat kesejahteraan aparatur pemerintah desa.
10.	Seftiawan Satur Hidayanto (2018)	Penerapan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa Dalam Pemberian Pelayanan Administrasi Oleh Aparatur Desa Kepada Masyarakat (Di Desa Plantaran)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa sudah cukup baik; dan (2) Kinerja aparat desa dalam memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat di Desa Plantaran berlangsung baik
11.	Achmad Aminudin (2019)	<i>Implementation of Good Village Governance in Village Development</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan desa secara nasional sudah berjalan dan terdapat perubahan yang cukup signifikan, tetapi masih ada beberapa tantangan dalam implementasinya.
12.	Jayadi Nas, Nurlinah, Haryanto (2019)	<i>Indigenous Village Governance: Lessons From Indonesia</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanah Toa menjalankan pemerintahan dengan nilai lokalitas berdasarkan beberapa aspek.
13.	Malau Hasbullah, Supriyono Bambang, Hakim Abdul, Muluk M.R. Khairul (2020)	<i>The implementation of Customary Values on The Administration of Governance: A Study on The Village Governance Based on Local Wisdom at</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai adat yang digunakan didasarkan pada sejarah dan asal-usulnya dan diterapkan sesuai dengan fungsinya melalui organisasi.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Nagari Kapau, Agam Regency of West Sumatera, Indonesia</i>	pemerintahan sebagai instrumen masyarakat adat. Dengan demikian, hal tersebut berarti bahwa nilai-nilai tradisional di Nagari Kapau adalah modal sosial yang digunakan dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa Nagari sebagai pemerintahan adat
14.	Sofyan Effendi (2020)	<i>The Capability of Village's Administration in the Implementation of an Effective Village Consultative Meeting Following the Indonesian Government's Regulation</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan musyawarah desa telah terlaksana dengan efektif, dimana seluruh aspek yang dipersyaratkan dalam peraturan tersebut telah diikuti.

Sumber : Berbagai sumber yang sudah diolah oleh peneliti (2020)

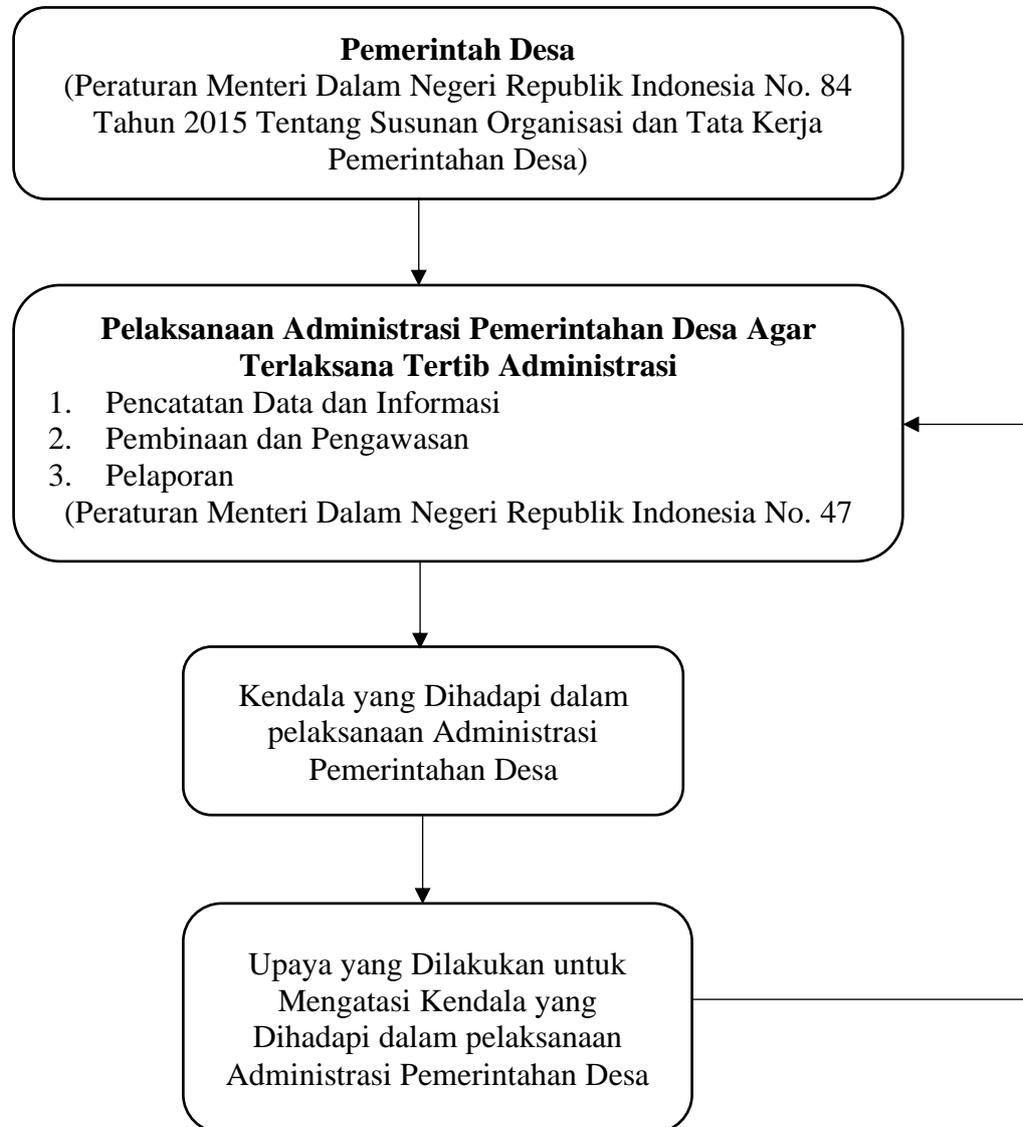
2.6. Kerangka Berpikir

Pelaksanaan administrasi berpengaruh penting bagi jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal itu disebabkan karena dengan pelaksanaan administrasi yang benar, rapi, dan tertib akan memberikan data dan informasi yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana, kontrol kegiatan, evaluasi, dan komunikasi dan informasi baik ke dalam maupun keluar organisasi. Pemerintah desa sebagai pelaksana tugas pemerintahan desa, perlu menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) masing-masing yang diuraikan pada Permendagri No 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Begitupula dalam

hal administrasi, pemerintah desa yang bertugas dalam bidang administrasi hendaknya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Tupoksi.

Pelaksanaan administrasi pemerintahan desa diatur dalam Permendagri No. 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa. Peraturan tersebut sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa di Desa Tamangede, dimana pelaksanaan administrasi terdiri atas pencatatan data dan informasi, pembinaan dan pengawasan, serta pelaporan. Dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, tidak luput dari adanya kendala-kendala yang dapat menghambat jalannya administrasi. Namun, kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan upaya yang dianggap mampu untuk meminimalkan kendala tersebut dalam menghambat pelaksanaan administrasi pemerintahan desa. Apabila pelaksanaan administrasi sudah sesuai dengan Permendagri No. 47 Tahun 2016, pemerintah desa menjalankan tugasnya sesuai Tupoksi masing-masing, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi dapat diatasi dengan baik, maka akan dihasilkan tertib administrasi yang dapat menunjang jalannya pemerintahan desa.

Kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Tamangede Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, maka peneliti memberikan simpulan bahwa :

- 1) Pelaksanaan tugas administrasi oleh perangkat desa Tamangede belum sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Desa.
- 2) Pelaksanaan administrasi pemerintahan desa Tamangede ditinjau dari beberapa aspek, antara lain :
 - a) Tertib pencatatan data dan informasi secara manual masih kurang baik.
 - b) Tertib pencatatan data dan informasi berbasis sistem informasi sudah dilaksanakan dengan baik.
 - c) Pembinaan terhadap pelaksanaan administrasi pemerintahan desa Tamangede dilaksanakan oleh pihak kecamatan Gemuh dan pihak Kabupaten Kendal. Sedangkan pengawasan dilaksanakan oleh pihak kecamatan Gemuh dan Badan Permusyawaratan Desa.
 - d) Pelaporan terkait administrasi desa Tamangede diteruskan kepada pihak kabupaten Kendal melalui pihak kecamatan Gemuh.
- 3) Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa tamangede, antara lain sumber daya manusia yang masih rendah, Kaur Keuangan tidak mampu input data pada SISKEUDES, beban tugas Kaur Umum dan Perencanaan yang terlalu banyak dan kesulitan input data

padasistem informasi ketika terjadi pemadaman listrik.

- 4) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan desa, antara lain adanya saling kerja sama antar perangkat desa, input data terkait keuangan dialihkan menjadi tugas Kaur Umum dan Perencanaan, pengurangan tugas Kaur Umum dan Perencanaan, serta perangkat desa menyimpan sistem informasi pada ponsel atau laptop pribadi.

5.2. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa Tamangede sebaiknya berperan aktif dalam mendampingi perangkat desa dalam pelaksanaan tugas administrasi supaya lebih mudah dipantau dan dapat membantu ketika perangkat desa mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tugasnya.
- 2) Pengadaan evaluasi mengenai pelaksanaan administrasi oleh perangkat desa yang dilaksanakan setelah dilakukan pelaporan mengenai administrasi. Evaluasi dapat digunakan sebagai tolak ukur mengenai pelaksanaan administrasi yang sudah dilaksanakan sehingga dapat dilakukan perbaikan apabila masih terdapat kekurangan.
- 3) Pihak Kecamatan dan Kabupaten sebaiknya memberikan pelatihan bagi perangkat desa yang dilaksanakan secara rutin baik 3 bulan sekali maupun 6 bulan sekali. Pelatihan tersebut gunanya untuk mengasah keterampilan

dan kemampuan perangkat desa agar lebih mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

- 4) Dengan banyaknya perubahan dalam pelaksanaan administrasi karena perkembangan teknologi, sebaiknya perangkat desa memiliki kesadaran untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan diri agar dapat mengikuti perkembangan tersebut dan tidak hanya mengandalkan rekan kerjanya yang lebih mampu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Ilmu* (edisi ke 4). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Aminudin, A. (2019). Implementation of Good Village Governance in Village Development. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(1), 1-17
- Arsjad, M. F. (2018). Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 16-32
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2018). *Petunjuk Pengoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa*. Diakses pada situs web Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan pada 10 Agustus 2020
- Darmi, T., Ekowati, S. (2020). Strengthening Village Apparatus Capacity in Village Development in Air Periukan Village, Seluma District, Bengkulu Province, Indonesia. *Economics, Management and Sustainability*, 5(1), 68-74
- Dewi, R.M. (2012). *Analisis Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Djafri, N., dkk. (2017). The Administrative Management Capacity of Village Chief. *European Journal of Business and Management*, 9(31), 94-100
- Effendi, S. (2020). The Capability of Village's Administration in the Implementation of an Effective Village Consultative Meeting Following the Indonesian Government's Regulation. *Journal of Governance and Political Social UMA*, 8(1), 18-27
- Fendri, A. (2016). *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hasbullah, M., dkk. (2020). The implementation of Customary Values on The Administration of Governance: A Study on The Village Governance Based on Local Wisdom at Nagari Kapau, Agam Regency of West Sumatera, Indonesia. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Studies*, 2(98), 49-58
- Hidayanto, S.S. (2018). *Penerapan Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa dalam Pemberian Pelayanan Administrasi*

Oleh Aparatur Desa Kepada Masyarakat (di Desa Plantaran).
Semarang:Universitas Negeri Semarang

Islami, U. (2016). *Kapasitas Aparatur Desa dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.* Bandar Lampung:Universitas Lampung

Karmawan dan Yanuar. D. (2018). Contribution Linkage and Role of Village Apparatus in Village Finance Management to Achieve Accountability of Village Revenue Expenditure Budget. *Integrated Journal of Business and Economics*, 39-48

Kuswanto, A. (2017). *Pengantar Ilmu Administrasi.* Semarang:Penerbit Fastindo

Liando, D. M. (2012). The Influence of Population Administrative Policy Implementation on the Quality of Id Card Service. *Journal of Administrative Science & Organization*, 19(2), 124-127

Maga, B., dkk. (2017). Peranan Pemerintahan Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi (Suatu Studi di Desa Ammat Selatan Kecamatan Tampan Amma Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 1-11

Maksum, I. R., Sangaji, A. (2019). State Authority in Utilization of Village Fund in Susukan Village, Bogor, West Java. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(2), 165-176

Marnis, dkk. (2013). Development of Public Administration Program Development System in Rural Services in Order to Increase the Capacity of Governance in Village East Java. *Journal of Business and Management*, 10(1), 12-21

Menteri dalam Negeri Republik Indonesia. (2015). Peraturan Mendagri tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Permendagri Nomor 84 Tahun 2015). Jakarta:Penulis. Diakses dari <https://bulelengkab.go.id/>

Menteri dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mendagri tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Permendagri Nomor 47 Tahun 2016). Jakarta:Penulis. Diakses dari <https://infoasn.id/>

Menteri dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Mendagri tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Permendagri Nomor 95 Tahun 2019). Jakarta:Penulis. Diakses dari

Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (edisi ke 29). Bandung:PT Remaja Rosdaka

- Moonti, R. M., Ahmad, I. (2019). Budget Supervision and Mechanism by An Administrative Village in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 3(2), 176-186
- Nas, J., dkk. (2019). Indigenous Village Governance: Lessons From Indonesia. *Public Administration Issues*, 2, 94-104
- Nurasa, H. (2012). The Influence of Administrative Reform Towards the Rural Community's Participant. *Journal of Administrative Science & Organization*, 19(1), 1-7
- Nurcholis, C., dkk. (2019). Village Administration in Indonesia: A Socio-Political Corporation Formed by State. *Open Journal of Political Science*, 9, 383-404
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta:Penerbit:Erlangga
- O'Brien, J.A. (2005). *Pengantar Sistem Informasi (Perspektif Bisnis dan Manajerial)*. Jakarta:Salemba Empat
- Pamuji, K., dkk. (2018). Role of Village Consultative Board (BPD) in Village Administration of Janggolan Villages (Study in Sub-District of Sumpiun Banyumas Region). *Jurnal Dinamika Pendidikan*, 18(1), 37-46
- Presiden Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang tentang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014). Jakarta:Penulis. Diakses dari <https://www.peraturan.bpk.go.id/>
- Staf Desa Tamangede. *Profil Desa Tamangede*. Diakses 6 April 2020, dari <http://tamangede.kendalkab.go.id/>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (edisi ke 26). Bandung:Penerbit Alfabeta
- Sulandra, I.M., dan Mudarya, I.N. (2018). Kemampuan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan Desa. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 9(1), 28-38
- Surachman, A. (2016). *Panduan Gaya Penulisan Sitiran Karya Ilmiah*. Diakses dari Universitas Gadjah Mada, Situs Web Perpustakaan, <http://lib.ugm.ac.id/>
- Syafiie, I.K. (2006). *Ilmu Administrasi Publik* (edisi ke 2). Jakarta:PT Rineka Cipta
- Winarno, W.W. (2006). *Sistem Informasi Manajemen* (Edisi ke 2). Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan

Yulianti, dkk. (2017). The Indicators of Village Administrative Officer's Understanding of Siskeudes: A Literature Study. *Economics & Business Solutions Journal*, 1(1), 81-90